

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 :
“Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	1.1 Meningkatnya produksi dan dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan Kapasitas Produksi, melalui: • Peningkatan produksi pertanian melalui : Tanam tanaman pangan dan komoditi pangan lokal, Tanam Jagung (terintegrasi dengan sektor peternakan), dan Hortikultura. • Peningkatan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas. • Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian. • Pengembangan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial
	1.2 Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Peningkatan Jumlah Kunjungan, lama tinggal dan belanja wisata • Pengembangan atraksi wisata • Peningkatan intensita penyelenggaraan event kepariwisataan • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu,antara dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah
	1.3 Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	1. Pemantapana infrastruktur perdagangan • Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dgital untuk UMKM 2. Perbaikan system usaha dan investasi • Percepatan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbvasis online
	1.4 Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan keja	1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja • Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja. • Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja.

AR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja • Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan. • Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program - program peningkatan keahlian. 3. Perlindungan terhadap pekerja • Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
	1.5 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan • Sosialisasi pemanfaatan skema pembiayaan untuk rumah tangga miskin. • Perbaikan sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif. • Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat. • Fasilitasi kelompok rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skema pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah.
	1.6 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga • Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya). • Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptif dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat. • Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan /kelompok disabilitas.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga.
	1.7 Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat - Perluasan subsidi/jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim). - Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim). 2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil - Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah (kabupaten) yang fokus pada usaha produktif sektor pertanian, peternakan, perikanan/kelautan dan industri mikro (RT). - Penguatan BUMDES pada wilayah terpencil untuk memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat. 3. Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru - Koordinasi dan fasilitasi kawasan pedesaan/penyangga untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru - Koordinasi pendanaan dengan Pusat untuk pengembangan pusat ekonomi baru
	1.8 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Pemantapan Sistem dan Regulasi - Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak. - Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas Pajak dan Distribusi. - Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak. - Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi. - Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala.

AR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Pemantapan Sistem Pemungutan • Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompot elektronika, dan E-Payment. • Penerapan amnesti pajak/retribusi daerah secara terbatas untuk perluasan basis pajak dan retribusi. 3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset • Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. • Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi • Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah • Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara komprehensif.
	1.9 Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial	1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan dan disabilitas • Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. • Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. • Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. • Kesempatan berusaha yang layak. • Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. 2. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan dan disabilitas • Jaminan advokasi dan pembelaan secara hukum. • Jaminan rehabilitasi akibat berbagai tindakan traumatik. • Penguatan kelembagaan perlindungan bagi kelompok perempuan. 3. Pemantapan perlindungan terhadap anak • Perluasan Kota dan Desa Ramah Anak. • Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan traumatik.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		• Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak.
	1.10 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	• Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak. 1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan • Intensifikasi produksi pangan utama pada skala RT. • Ekstensifikasi Pangan alternatif sebagai penyanggah pangan utama. 2. Peningkatan akses RT terhadap Pangan • Penyiapan subsidi pangan bagi RT Miskin. • Pemantapan stok pangan pada saat krisis. 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat • Peningkatan kemampuan RT dalam pemanfaatan pangan secara tepat dan benar. • Subsidi pangan bergizi bagi kelompok 1000 PHK (Ibu Hamil dan Ibu Menyusui dengan anak Baduta). 4. Dukungan Regulasi • Penyusunan dan penetapan regulasi (Perda) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata • Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. • Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca 1 jam sehari. • Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju Akreditasi Minimal B bagi SMA, SMK dan SLB. • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai melalui berbagai Sumber Pembiayaan (DAK, CSR, APBD Provinsi dan APBN). • Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam Membaca, Menulis, Berbicara, Berhitung dalam memecahkan masalah. • Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui penyediaan Modul Pembelajaran Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i SMA/SMK, Organisasi

AR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Kepemudaan, Perguruan Tinggi di wilayah NTT. 2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan tidak mampu melalui penyediaan Beasiswa. 3. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship • Kerjasama pengembangan Keterampilan siswa SMK di Balai Latihan Kerja untuk menuju SDM unggul melalui Pendidikan Vokasi. • Meningkatkan Keterampilan Penduduk Usia Kerja. • Mengoptimalisasi Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Sekolah Kejuruan. 4. Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru • Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap Sekolah (SMA, SMK dan SLB). • Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SMK, SMA dan SLB. • Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA, SMK dan SLB.
	2.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan • Penyediaan Laboratorium, sarana prasarana dan tenaga laboran untuk peningkatan ketahanan kesehatan daerah. • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan spesifik Lokal (obat herbal dan tradisional). • Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan. 2. Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan • Penyediaan layanan kesehatan bergerak untuk mempermudah layanan kesehatan di destinasi wisata dan DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan).



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		• Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% (UHC = Universal Health Care 100%). • Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan. • Penyediaan dan distribusi tenaga medis (Dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan. • Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi. • Perbaikan sistem dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Memastikan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk. • Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total. 3. Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 4. Pencegahan Stunting • Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahannya sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan. • Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil, bayi dan balita yang terintegrasi dengan PAUD HI. • Mendorong replikasi PAUD HI sebagai salah satu upaya pencegahan dan eradikasi stunting. • Peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin. • Perbaikan perilaku hidup sehat. • Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting secara terpadu.

A

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, kewilayahan dan Mitigasi Bencana	3.1 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan • Pemanfaatan sumber pembiayaan internal (APBD) dan eksternal secara terukur untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pengairan. • Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan. 2. Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian • Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air. • Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras provinsi dan kabupaten. • Dukungan pembiayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan. • Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin terselenggaranya tata kelola air yang baik.
	3.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah	1. Pengelolaan Tata Ruang yang berkelanjutan • Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. • Peningkatan koordinasi tata ruang dengan pemerintah kabupaten/kota. • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis Provinsi. 2. Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca • Penyebarluasan gerakan hemat energi, pengelolaan sampah organik dan non organik. • Peningkatan penggunaan EBT. • Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Mangrove. • Pengelolaan DAS secara terpadu dan holistik antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

AR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	3.3 Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat - Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur. - Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. - Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan berkesinambungan. - Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana serta Adaptasi terhadap Perubahan Iklim seperti Peta dan Informasi Spasial, Teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal. - Peningkatan penggunaan Teknologi Internet sebagai media untuk Komunikasi, Publikasi, Informasi tentang Jalur Evakuasi, Lokasi Posko dan Pusat - Pusat Pelayanan terdekat. - Peningkatan informasi dari seluruh situs Perangkat Daerah (PD) tentang kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Bencana (BPB). - Peningkatan penggunaan Teknologi Seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyampaian pesan kepada masyarakat. Penguatan Tatakelola Resiko Bencana - Penerapan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. - Optimalisasi penerapan Standar Bangunan Tahan Gempa Bumi dan Tsunami terutama untuk Bangunan Publik dan Bangunan Vital.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	4.1 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	1. Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan • Penerapan e-government, e-planning, e-budgeting secara terpadu. • Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja secara terpadu. • Pemantapan sistem pendataan secara terpadu untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara terpadu. • Pemantapan protokol akses informasi dan pemasukan data secara terkendali. • Pemantapan pelaksanaan maintenance system secara teratur dan berkelanjutan. • Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan sistem. • Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan. 2. Reformasi Regulasi • Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web. • Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan. • Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistis dan terukur sebagai dasar penentuan pemberian tunjangan kinerja. 3. Peningkatan Kapasitas SDM • Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. • Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi

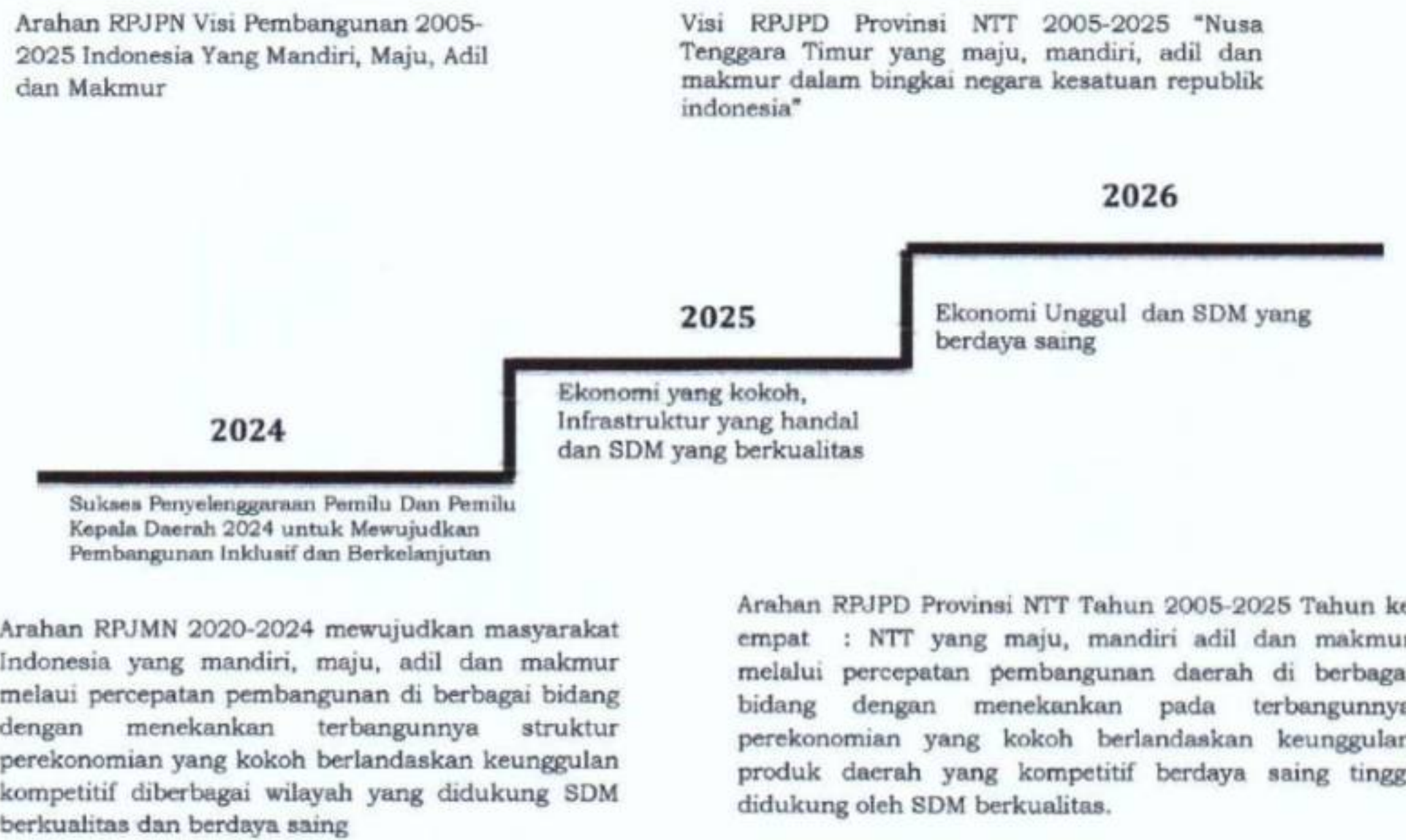


TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah. • Pemberian Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas. • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme <i>assessment centre</i>, seleksi terbuka dan manajemen <i>talent pool</i>. • Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Penerapan <i>role model</i>, agen perubahan dan budaya kerja. • Rekrutmen ASN berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan ASN pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi. • Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi melalui peran serta dunia usaha. • Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan melalui ketersediaan dan penguatan kapasitas SDM yang handal serta sarana prasarana yang memadai. • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.



6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan Tabel 6.2 berikut.



Gambar 6.1 Arah Kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

ARAH KEBIJAKAN		
TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS	EKONOMI UNGGUL DAN SDM YANG BERDAYA SAING
➤ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan ➤ Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal	➤ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal ➤ Penguatan system ekonomi masyarakat ➤ Sinergitas tujuan pembangunan dan	➤ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan

Handwritten signature or mark.

ARAH KEBIJAKAN		
TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
➤ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM ➤ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.	➤ pemangku kepentingan lainnya ➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM	➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM

Arah kebijakan dari tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka perumusan program pembangunan daerah harus mengakomodir program – program strategis Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan keterkaitan antar bidang urusan pemerintah daerah, status Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pencapaian SDGs dan SPM maka di dalam merangkai program – program yang menjadi prioritas daerah juga merujuk pada penelaahan hasil dari Bab II,III,IV dan V, sehingga menghasilkan pemilihan program- program prioritas yang dapat dipedomani oleh Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya.

Selain itu juga, dengan memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan yang berlaku dari pusat sampai daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan beberapa program unggulan/prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 6.3 di bawah ini.

Handwritten signature

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial											
			1.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah											
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan											
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				2.975.098.000		2.845.138.963		2.944.796.539			
				Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	Ha	701.545	790.420		790.420		803.326		803.326	DKP
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				24.813.592.799		24.405.731.613		25.260.643.237			
				Produk Perikanan Tangkap	Ton	186.364	200.000		205.000		210.000		210.000	DKP
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.339.624.019		1.902.709.379		1.969.359.640			
				Produk Perikanan Budidaya	Ton	1.404.233	1.620.000		1.749.600		1.889.568		1.889.568	DKP
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.964.896.800		2.213.772.960		2.291.319.508			
				Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	10,34	6,89		3,45		0		0	DKP
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				121.838.158		116.515.785		120.597.232			
				Angka Konsumsi Ikan	kg/perkapita /tahun	45,92	56.00.00		58.00.00		60.00.00		60.00.00	DKP
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				363.452.443		355.203.150		367.645.608			
				Cakupan produk ekraf yang yang mendapatkan HKI	%	N/A	33,33		33,33		33,33		100	Disparekrat
				Persentase produk ekraf yang dipasarkan melalui media digital	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100	Disparekrat
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				23.729.211.175		18.532.830.101		19.182.019.075			
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Besar	%	6,10	5,01		6,68		6,11		6,11	Dinas Peternakan
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil	%	11,00	11,32		11,37		11,48		11,48	Dinas Peternakan
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas	%	5,80	5,52		5,98		6,05		6,05	Dinas Peternakan
				Persentase Konsumsi Daging	%	9,11	9,61		10,11		10,61		10,61	Dinas Peternakan
				Persentase Konsumsi Telur	%	3,00	3,20		3,40		3,60		3,60	Dinas Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				18.808.734.165		23.369.160.838		24.005.704.824			
				Produksi Tanaman Padi	Ton	772.475	847.240,27		889.602,28		934.082,40		934.082,40	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Jagung	Ton	654.921,04	869.618,32		913.099,23		958.754,20		958.754,20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Sorgum	Ton	3.274,95	3.610,63		3.791,16		3.980,72		3.980,72	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

A

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Produksi kedelai	Ton	1.030	2.654,43		2.787,16		2.926,51		2.926,51	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi kacang hijau	Ton	7.470,00	12.126,12		12.732,43		13.369,05		13.369,05	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Jeruk	Ton	46.474	65.770,46		69.058,99		72.511,94		72.511,94	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Mangga	Ton	81.997	101.061,82		106.114,91		111.420,66		111.420,66	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Bawang Merah	Ton	5.715	13.230,50		13.892,02		14.586,62		14.586,62	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Cabe	Ton	8.359	6.269,70		6.583,18		6.912,34		6.912,34	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Kelapa	Ton	67.857,00	71.065,97		73.197,95		75.393,89		75.393,89	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Kopi	Ton	26.256,00	28.229,32		29.076,20		29.948,49		29.948,49	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Kakao	Ton	20.787,00	22.502,89		23.177,97		23.873,31		23.873,31	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Jambu Mete	Ton	53.007,00	57.382,95		59.104,44		60.877,57		60.877,57	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman	Ton	5.699,00	4.419,00		4.551,57		4.688,12		4.688,12	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	(Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cengkeh									Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
				Produksi Tanaman (daun basah)	Ton	3.000,00	3.713,15		3.824,54		3.939,28		3.939,28	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan penggunaan benih bersertifikat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan Penggunaan Pupuk	%	13,00	17,00		19,00		21,00		21,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Rasio ketersediaan alatiran	%	13,00	13,79		14,20		14,63		14,63	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					105.000.000		98.500.000		120.000.000		
				Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Peternakan
				Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	%	0,00	75,00		80,00		85,00		85,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					840.128.076		501.826.643		519.405.196		
				Persentase Ternak yang sehat	%	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00	Dinas Peternakan
				Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	38,00	43,00		48,00		53,00		53,00	Dinas Peternakan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN					1.125.000.000		1.030.500.000		1.050.000.000		

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											
				Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	56,00	75,00		75,00		75,00		75,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.450.000.000		1.295.500.000		1.450.000.000		
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	%	71,45	86,45		4,03		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)	%	70,67	78,01		89,00		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)	%	51,75	64,91		3,45		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama)	%	30,00	33,33		66,67		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan												
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					97.565.333		95.370.434		98.711.176		
				Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15,39	15,43		15,47		15,51			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					35.000.000		35.000.000		35.000.000		

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	45,00	45,00		49,00		51,00		51,00	Disperindag
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian												
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				270.561.372		264.420.431		273.682.849			
				Pertumbuhan industri pengolahan	%	1,25	1,50		1,75		2,00		2,00	Disperindag
		1.2 Meningkatnya peranan Pariwisata untuk mendukung Perekonomian												
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata												
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				519.769.719		342.230.799		354.218.847			
				Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekrak
				Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	%	NA	4,17		4,17		0,53		20,83	Disparekrak
				Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekrak
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				900.000.000		1.045.314.358		1.081.930.814			
				Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) (2	%		31,82		31,82		36,36		100	Disparekrak
		1.3. Meningkatnya Investasi dan Neraca Perdagangan												
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
3	30	2	PROGRAM PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				35.000.000		35.000.000		35.000.000			

A

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Terangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	45,00	45,00		49,00		51,00		51,00	Disperindag
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
				Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	16,67	28,57		11,11		20,20		20,20	Disperindag
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					899.916.614		956.316.048		989.814.970		
				Nilai transaksi produk yang dipasarkan	%	40,00	60,00		80,00		100,00		100,00	Disperindag
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian												
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					270.561.372		264.420.431		273.682.849		
				Pertumbuhan industri pengolahan	%	1,25	1,50		1,75		2,00		2,00	Disperindag
		1.4. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Kesempatan Kerja												
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja												
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
				Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	70,00	90,00		92,00		95,00		95,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					519.662.000		519.662.000		550.000.000		
				Persentase penempatan tenaga kerja di pasar kerja	%	70,00	75,00		78,00		78,00		78,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					365.000.000		334.708.000		350.061.000		
				Persentase Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial	%	11,17	12,40		13,63		14,86		14,86	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
				Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	%	-	45,00		67,00		70,00		70,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga											
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					497.866.745		1.405.784.591		1.455.028.006		
				Jumlah wirasaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	orang	1438,00	250,00		250,00		250,00		750,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			1.5. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat											
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah											
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					2.736.326.000		2.618.807.700		2.796.065.000		
				Persentase koperasi aktif	%	93,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					158.182.000		99.421.900		188.051.000		
				Persentase SDM koperasi yang dilatih	%	5,00	8,00		8,00		8,00		8,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
														Kerja Dan Transmigrasi
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					418.428.000		404.391.700		425.563.000		
				Persentase kelompok UMKM yang dibina	%	54,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.390.928.000		4.595.068.059		5.398.063.000		
				Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	%	3,00	9,00		9,00		10,00		10,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					258.599.071		252.729.639		261.582.339		
				Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekrif
				Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekrif
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					138.615.068		23.907.614		24.745.077		
				Persentase rata-rata kenaikan barang pokok	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag

A

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				per tahun										
				Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					500.341.666		838.519.141		867.891.740		
				Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	%	53,00	60,00		65,00		70,00		70,00	Disperindag
				Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	%	17,55	20,00		25,00		30,00		30,00	Disperindag
			1.6 Menurunkan Kemiskinan Masyarakat											
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					840.000.000		96.630.839		98.980.705		
				Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR
				Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.112.500.000		2.112.500.000		2.112.500.000		
				Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	100,00	95,00		93,00		88,00		88,00	Dinas PUPR
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM					577.500.000		577.500.000		577.500.000		

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			(PSU)											
				Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	4,55	4,55		18,18		22,73		22,73	Dinas PUPR
1	6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial												
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				3.457.000.000		1.328.131.728		1.374.655.031		
					%	80,00	80,00		90,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORDAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya				260.000.000		23.907.901		24.745.374		
					%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial				10.300.000.000		10.048.152.917		10.400.131.004		
					%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				13.524.000.000		31.874.013.895		32.990.532.974		
					%	80,00	90,00		90,00		90,00		90,00	Dinas Sosial
				Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					529.000.000		23.907.901		24.745.374		
				Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan	%	100,00	80,00		90,00		90,00		100,00	Dinas Sosial

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Makam Pahlawan Nasional Provinsi										
3	29		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral											
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN											
				Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun	% (KW)	17,00	20,00	25.000.000	30,48	84.854.234.070	35,00	87.826.604.338	35,00	Dinas Edm
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					88.050.247.971		1.825.027.522		1.888.956.654		
				Persentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik	Unit	89,01	93,00		94,00		95,00		95,00	Dinas SSDM
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi											
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					275.000.000		225.000.000		275.000.000		
				Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					535.000.000		500.000.000		437.776.282		
				Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					464.229.000		400.000.000		475.000.000		
				Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans
			1.7 Menurunkan Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat											
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa											
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan				50.000.000		42.204.235		43.682.613		

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)										
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Desa	111 Desa	32 Desa Persiapan		24 Desa Persiapan		20 Desa Persiapan		433 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan				585.000.000		544.199.890		563.262.741		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	141 Perbub	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/ Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.454 BUMdes di 21 Kabupaten	21 Kabupaten	21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTO)				965.000.000		1.087.060.232		1.125.139.010		
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Profilas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
				Jumlah alat TTG yang diproduksi	678 Unit	20 unit	20 unit		20 unit		20 unit		738 Unit	Dinas Pemberdayaan n Masyarakat Desa
			1.8 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah											
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
	18	1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					60.000.000		50.000.000		55.000.000		
				Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	%	61,38	61,38		100,00		100,00		100,00	DPMTSP
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					200.463.142		23.907.901		24.745.374		
				Persentase Pertumbuhan Investor	%	30,00	35,00		40,00		45,00		45,00	DPMTSP
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					195.705.136		191.263.209		197.962.994		
				Persentase Pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	%	60,00	65,00		70,00		75,00		75,00	DPMTSP
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					212.583.763		110.028.445		113.882.646		
				Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SO	%	100,00	100,00		100,00		100,00			DPMTSP
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					415.899.132		734.833.251		760.573.823		

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase FMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	DPMTSP
5	2		KEUANGAN											
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.255.000.000		1.616.172.783		1.672.785.914		
				Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
				Persentase pemanfaatan aset	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
				Persentase Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					15.025.000.000		13.803.062.032		14.286.571.331		
				Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	19,41 (2021, audited)	22,00		23,00		24,00		24,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
			1.9 Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial											
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
				Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	%	84,61	95,00		97,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan n Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN					448.681.400		369.334.326		382.271.787		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PEREMPUAN											
				Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
				Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	27,00	64,00		82,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
				Cakupan ketersediaan data terdapat di OPD lingkup Provinsi	%	10,00	15,00		18,00		20,00		20,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
				Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	4,50	9,00		13,50		18,00		18,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					83.788.000		80.127.809		82.934.616		
				Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah											
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				418.428.000		404.391.700		425.563.000			
			Persentase kelompok UMKM yang dibina	%	54,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				5.390.928.000		4.595.068.059		5.398.063.000			
			Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	%	3,00	9,00		9,00		10,00		10,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
			1.10 Terwujudnya Ketahanan dan Keadilan Pangan											
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				862.000.000		849.070.000		962.000.000			
			Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	%	13,00	20,00		25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				300.000.000		295.500.000		300.000.000			
			Persentase daerah rentan pangan	%	25,88	24,50		24,00		23,50		-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				300.000.000		295.500.000		300.000.000			
			Persentase Produsen pangan segar terjamin	%	12,00	20,00		25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				keamanan pangan									Ketahanan Pangan	
			2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing											
			2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing											
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.038.874.781.169		1.045.701.881.196		1.082.331.911.686		
				Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	76,00	80,00		82,00		85,00		87,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB	%	74,85	76,85		78,00		80,00		82,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	%	75,00	85,00		90,00		95,00		97,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					7.000.000.000		23.907.901		24.745.374		
				1. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	41,16	45,13		54,15		63,18		72.20,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	38,31	44,07		50,85		64,75		88.14,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				3. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	0,00	6,00		13,00		19,00		19	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Handwritten signature

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				4. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				5. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				1. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	1,10	27.44.00		28.06.00		28.67		29.08.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	27.94	28.60		29.22.00		29.91		30.53.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				3. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	0,80	20.07		0,879166667		21.25		0,917361111	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERIZINAN PENDIDIKAN						100					Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.	%	26.67	53		67		80		100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					230.452.640		230.452.640		230.452.640		
				Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas	%	66,67	75,00		83,33		91,67		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)										
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga												
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SANG KROLAHRAGAAN				7.000.000.000		5.833.690.722		6.038.039.852			
			Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan										Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Medali	Medali	200,00	50,00		50,00		50,00		150,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor	Cabor	8,00	10,00		11,00		13,00		13,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik											
			Medali	Medali	30,00	15,00		25,00		35,00		75,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor	Cabor Atletik	1,00	3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor Tradisional	Medali	-	5,00		5,00		5,00		5,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor Rekreasi	Cabor	4,00	5,00		5,00		5,00		5,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			733.894.259		717.237.036		742.361.228			
				Organisasi (Kwarcab)		7,00		8,00		8,00		23,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan												
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.089.297.525		2.089.297.525		2.089.297.525			
			Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20	%	89,77	92,05		95,45		98,85		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				unit, Bahasa Daerah 68 unit)										
				Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					5.996.386.055		2.660.471.246		2.753.665.248		
				Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					330.000.000		38.836.909		40.186.982		
				Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sunggar) Budaya 25 Unit)	%	16,00	24,00		32,00		40,00		44,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAQAR BUDAYA					1.477.293.620		697.728.188		722.169.002		
				Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	25,93	37,04		74,07		92,59		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					4.416.500.000		2.390.790.121		2.474.537.426		
				Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					818.412.278		2.368.876.036		2.451.855.688		
				Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan	%	60,00	75		90		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				e-library										
				Presentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	%	25,00	50		75		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
				Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun	%	100,00	100		100		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					75.000.000		717.237.036		178.104.455		
				Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	%	45,50	50,00		60,00		70,00		70,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
			2.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan											
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					183.200.970.024		139.178.770.469		144.054.082.159		
				Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (BPM Kesehatan Provinsi)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Balita	Persen (%)	17,70	15,70		13,50		11,50		11,50	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Stunting									Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
				Persentase Balita Wasting	Persen (%)	20,50	19,50		18,50		17,50	17,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
				Persentase Balita Underweight	Persen (%)	8,50	7,50		7,00		6,50	6,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
				Angka Kematian Ibu	Kasus/100.000 KH	192/100.000 KH	172/100.000 KH		152/100.000 KH		132/100.000 KH	132/100.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
				Angka Kematian Bayi	Kasus/1000 KH	10/1.000 KH	9/1.000 KH		8/1.000 KH		7/1.000 KH	7/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
				Angka Kematian Balita	Kasus/1000 KH	12/1.000 KH	11/1.000 KH		10/1.000 KH		9/1.000 KH	9/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	83,90	100,00		100,00		100,00	100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	%	31,81	70,00		80,00		90,00		90,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Success Rate (SR) TBC >85%	%	89,00	85,00		85,00		85,00		85,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kasus HIV Yang diobati	%	56,00	58,00		60,00		62,00		62,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar	%	50,00	60,00		65,00		70,00		70,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	% (Kab/Kota)	0,00	36 (8 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	50,00	70,00		90,00		100,00		100,00	Ra Jira Naimata Kupang
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					102.878.323.404		96.908.862.163		100.303.495.604		
				Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	78,20	100,00		100,00		100,00		100,00	Raud Prof. W.Z Johannes

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	%	45,00	52,00		52,00		52,00		52,00	Raud Prof. W.Z.Johannes
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					7.922.452.800		24.239.264.875		25.088.345.313		
				Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan n Dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan n Dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					218.039.184		3.634.428.457		3.761.739.336		
				Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Raud Prof. W.Z.Johannes
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN			*		199.860.000		199.860.000		199.860.000		
				Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan n Dan Pencatatan Sipil
	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.831.893.500		2.831.893.500		2.831.893.500		
				1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan	%	1,30	1,50		1,60		1,65		1,65	Dinas Kesehatan, Kependudukan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				gerakan masyarakat hidup sehat										n Dan Pencatatan Sipil
				2. Presentase Kabupaten/Kota yang melakukan Pembinaan Posyandu Aktif	%	2,23	2,10		2,10		2,10		2,10	
				3. Presentase Kabupaten/Kota yang minimal melaksanakan Posyandu Aktif	%	3,40	3,50		3,65		3,75		3,75	
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,29 Rata-rata anak per Wanita	2,27 Rata-rata anak per Wanita		2,2		-		-	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		-		-	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Mitigasi Bencana											
			3.1 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekopomi dan Pelayanan Dasar											
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang											
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					17.349.999.000		13.201.581.052		13.664.020.994		
				Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	10.438.220	125.720		625.720		627.600		11.817.260	Dinas PUPR
				Cakupan Operasi	%	25,00	20,00		40,00		40,00		100,00	Dinas PUPR

Handwritten signature

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku										
				Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	%	0,00	33,33		33,33		33,33		33,33	Dinas PUPR
				Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	35.246,21	1000		2000		3000		41.246,21	Dinas PUPR
				Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi	%	25,00	23,58		37,74		38,68		100,00	Dinas PUPR
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					4.500.000.000		97.374.777		100.785.731		
				Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
				Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	%	0,00	20,00		60,00		20,00		100,00	Dinas PUPR
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.690.000.000		2.690.000.000		2.690.000.000		
				Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	%	0,00	60,00		20,00		20,00		100,00	Dinas PUPR
				Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				25.000.000		25.000.000		25.000.000			
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	%	0,00	0,00	0,00	75,00		25,00		100,00	Dinas PUPR	
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				1.600.000.000		6.694.212.028		6.928.704.473			
			Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Lokasi	26,00	1,00		2,00		2,00		5,00	Dinas PUPR	
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
			Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR	
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100,00	Dinas PUPR	
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				128.855.427.591		134.835.814.402		139.558.996.105			
			Persentase Kematapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	86,86		86,86		86,86		86,86	Dinas PUPR	
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
			Ratio Tenaga Kerja	%	60,73	63,84		66,94		70,04		70,04	Dinas PUPR	

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli										
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				200.000.000		765.052.838		791.851.976			
			Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0,00	43,48		86,96		100,00		100,00	Dinas PUPR	
			Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	%	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00	Dinas PUPR	
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
2	10	3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				45.000.000		45.000.000		45.000.000			
			Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100,00	Dinas PUPR	
2	10	7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				135.000.000		135.000.000		135.000.000			
			Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	13,64	18,18		18,18		18,18		68,18	Dinas PUPR	
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan											
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				3.896.352.824		478.794.067		495.565.508			
			Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	9,00	17,00		23,00		17,00		15,00	Dinas Perhubungan	
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				2.226.719.000		5.441.141.857		5.631.740.340			
			Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	8,00	11,00		14,00		17,00		15,00	Dinas Perhubungan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	%	66,00	33,00		33,00		33,00		100,00	Dinas Perhubungan
3	29		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral											
3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					657.955.520		589.185.418		609.824.073		
				Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	30,00	40,00		60,00		100,00		100,00	Dinas ESDM
				Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	25,00	50,00		75,00		100,00		100,00	Dinas ESDM
3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					730.730.920		456.667.422		472.664.086		
				Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	%	16,00	17,00		19,00		22,00		22,00	Dinas ESDM
			3.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah											
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup											
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					24.463.142		23.907.901		24.745.374		
				Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	%	-	50,00		75,00		100,00		100,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					490.505.567		479.372.545		496.164.550		
				Persentase pelayanan pengujian laboratorium	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kehutanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Pemerintah Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
														Dan Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				984.355.840		962.018.882		995.712.395			
			Persentase limbah B3 yang diolah	%	11,18	25,00		30,00		33,00		33,00		Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
3	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan												
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				18.197.672.189		17.784.639.007		18.407.619.496			
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	-	1,30		1,32		1,32		1,32		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				17.363.057		16.968.967		17.563.375			
			Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	-	10,99		10,99		10,99		10,99		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				97.585.333		95.370.434		98.711.178			
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15,39	15,43		15,47		15,51				Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			3.3 Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim											
1	5		Urusan Ketenteraman, Ketenteraman Umum Dan Linmas											
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.419.687.500		1.357.669.940		1.405.227.941		
				Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan	%	80 (4 Dokumen)	100,00		0,00		0,00		100 (5 Dokumen)	BPBD
				Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	60 (6 Lokasi)	80,00		100,00		0,00		100 (10 Lokasi)	BPBD
				Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	%	87,5 (140 Desa/ Kelurahan)	93,75		100,00		0,00		100 (160 Desa/ Kelurahan)	BPBD
				Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	%	18,18 (40 orang)	45,45		72,73		100,00		100 (220 orang)	BPBD
				Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki buffer stok logistik	%	100 (22 Kabupaten/ Kota)	100,00		100,00		100,00		100 (22 Kabupaten/ Kota)	BPBD
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					52.000.000		52.597.382		54.439.823		
				Persentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	57,62	100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					100.000.000		23.984.406		24.824.559		
				Persentase korban bencana alam dan sosial	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya										
			4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif											
			4.1 Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif											
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.808.842.261		2.030.380.250		2.101.502.711			
			Persentase Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum	%	91,49	100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika											
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.072.000.000		1.069.858.469		1.107.339.859			
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,38	85,00		90,00		95,00		95,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4.990.569.734		4.887.298.604		5.048.146.146			
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,28	2,50		2,70		3,00		3,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Internet berkualitas yang dikelola Dinas KOMINFO	PD	5,00	34,00		34,00		34,00		34,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				22.710.143		22.710.143		22.710.143			
			Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	79,49	85,00		90,00		95,00		95,00	Dinas Komunikasi Dan	

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pembiayaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
														Informatika
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					35.363.918		34.561.261		35.771.913		
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	II +	III		III +		III +		III +	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					761.500.000		353.989.594		366.389.543		
				Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
				Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	Angka Pengawasan Arsip	0,00	60,00		70,00		80,00		80,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	24	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					108.500.000		57.378.771		59.388.700		
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
4	1		Sekretariat Daerah											
4,00	1,00	1,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
				Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan
				Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan
4,00	1,00	1,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	%	100 (180 kegiatan)	100 (180 kegiatan)		100,00		100,00		100,00	Biro Umum
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					632.137.500		617.789.845		639.430.488		
				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai=80-90)	%	39,39	45,45		51,51		57,57		57,57 (19 PD)	Biro Organisasi
				Level Maturitas Kelembagaan	Nilai	40,67	45,00		47,00		49,00		49,00	Biro Organisasi
				Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,81 (Cukup)	2,85 (Cukup)		3,1 (Baik)		3,2 (Baik)		3,2 (Baik)	Biro Organisasi
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	%	0,00	15,15		30,30		45,45		45,45 (15 PD)	Biro Organisasi
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					820.319.213		18.700.399		29.783.269		
				Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
				Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
				Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
				Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.796.475.476		8.596.821.574		8.897.960.782		
				Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					782.820.540		765.052.838		791.851.976		
				Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	312,26	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Hukum
				Cakupan penanganan kasus Litigasi, Non-Litigasi dan HAM setiap tahun	%	526,60	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Hukum
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					562.652.782		549.882.053		569.143.944		
				Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro dan SDA)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomi An Dan Administrasi Pembangunan
				Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terkonsolidasi dengan baik	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomi An Dan Administrasi Pembangunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					6.239.980.846		6.098.349.788		6.311.969.695		
				Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro PBJ
				Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang dilakukan melalui e-Purchasing	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro PBJ
				Persentase JF Pengelola PBJ	%	44,00	64,00		84,00		100,00		100,00	Biro PBJ
4	1	8	PROGRAM KEBLIAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					97.852.345		95.631.356		98.981.239		
				Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	99,99	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomi An Dan Administrasi Pembangunan
4	2	Sekretariat DPRD												
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					74.676.943.331		67.501.647.751		69.866.171.961		
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	99,40	100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Dprd Provinsi Ntt
5	1	Perencanaan												
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.997.630.556		1.952.290.268		2.020.677.304		
				Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Bappelitbangda
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN					4.806.925.005		4.697.822.066		4.862.382.701		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PEMBANGUNAN DAERAH											
				Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Bappelitbangda
5	2		KEUANGAN											
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					910.292.801.356		889.837.088.500		921.007.310.405		
				Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Keuangan Daerah
				Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Keuangan Daerah
5	3		Kepegawaian											
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.824.047.207		3.737.252.677		3.868.165.399		
				Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	80,00	85,00		95,00		90,00			Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase Penurunan disiplin ASN	%	85,00	90,00		90,00		95,00			Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase Capaian Kinerja "BAIK" ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	%	90,00	95,00		95,00		95,00			Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase Penurunan disiplin ASN	%	85,00	90,00		95,00		95,00			Badan Kepegawaian Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
														Daerah
5	4		Pendidikan Dan Pelatihan											
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					20.034.920.941		20.265.994.542		20.975.894.765		
			Predikat akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Predikat Akreditasi	B	A			A		A		A	BPSDM
			Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat Akreditasi	B	A			A		A		A	BPSDM
			Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Predikat Akreditasi	B	B			A		A		A	BPSDM
			Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Predikat Akreditasi	B	B			A		A		A	BPSDM
			Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional	%	-	20,00			40,00		60,00		60,00	BPSDM
			Pelatihan sesuai standar	%	60,00	100,00			100,00		100,00		100,00	BPSDM
			Pelatihan sesuai kebutuhan	%	60,00	100,00			100,00		100,00		100,00	BPSDM
			Tersertifikasinya tenaga pelatihan pada BPSDMD	%	90,00	100,00			100,00		100,00		100,00	BPSDM
			Tersinya formasi jabatan fungsional widyaiswara sesuai formasi	%	-	100,00			100,00		100,00		100,00	BPSDM
			Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan pelatihan	%	-	100,00			100,00		100,00		100,00	BPSDM
5	5		Penelitian Dan Pengembangan											
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.185.128.297		1.158.229.399		1.198.801.170		
			Persentase Rekomendasi Hasil Kelibangan serta Fasilitas Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	%	0,00	100,00			96,55		100,00		100,00	Bappelitbangda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
5	6		Pengelolaan Perbatasan											
5	6	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				975.333.326		765.052.743		791.851.877		Badan Perbatasan Daerah	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	100,00	3 Dok		3 Dok		3 Dok		9 Dok	Badan Perbatasan Daerah	
			Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah	
			Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah	
5	7		Pengelolaan Penghubung											
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				591.301.000		589.764.888		610.423.841		Badan Penghubung	
			Meningkatnya Cakupan Pembinaan Masyarakat	%	100,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	%	80,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan Promosi Daerah	%	100,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung	
6	1		Inspektorat Daerah											
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.767.233.792		5.637.588.831		5.835.068.681		Inspektorat Daerah	
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	Inspektorat Daerah	
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada PD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	100,00	100		100		100		100	Inspektorat Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.759.284.468		1.722.986.304		1.783.341.021			
				Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD di Provinsi	%	100,00	100		100		100		Inspektorat Daerah	
8	1	Kesatuan Bangsa Dan Politik												
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				75.630.759		73.914.164		76.503.313			
				Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan RPK, FKUB, FKDM	%	100,00	70,00		80,00		87,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.920.549.243		3.831.561.404		3.965.780.783			
				Persentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, RPK, FKUB, FKDM	%	3,60	73,00		81,00		88,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah	
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				40.523.684		39.603.916		40.991.207			
				Persentase Peningkatan	%	65,30	70,00		75,00		81,00		Badan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian										Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA					263.246.501		257.271.586		266.283.586		
				Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	%	100,00	70,00		79,00		93,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2.289.003.786		2.237.050.190		2.315.412.119		
				Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	63,00		75,00		88,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah